



PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024



**Jl. Basuki Rahmat No.4
Bojonegoro**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan berisi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan oleh PD yang meliputi Renstra, Renja, DPA dan RKA yang berbasis kinerja..Keterkaitan yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam setiap dokumen, baik dalam proses penetapannya, rumusan indikatornya, maupun dalam proses pelaporan atau evaluasinya.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOJONEGORO**



WELLY FITRAMA, S.STP,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770917 199511 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-7
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	II-11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	II-17
BAB III RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN PD	
3.1 Program dan Kegiatan	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Kabupaten Bojonegoro.....	II-10
Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.....	II-18
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.....	3-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro untuk 3 (Tiga) tahun ke depan, seluruh Perangkat Daerah mempunyai peranan penting untuk keterlibatan didalamnya. Program – program dan kegiatan Perangkat Daerah harus sejalan dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPD Kabupaten Bojonegoro. RPD merupakan pedoman atau acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program – program dan kegiatan dalam 3 (Tiga) tahun kedepan yang disebut Renstra- PD Tahun 2024-2026. Dalam mewujudkan pencapaian Renstra, maka sangat diperlukan penjabaran lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang disebut Renja Perangkat Daerah.

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja -PD) tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 yang artinya adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Organisasi dan merupakan penjabaran dari Renstra-PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA – PD. RKA inilah yang menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

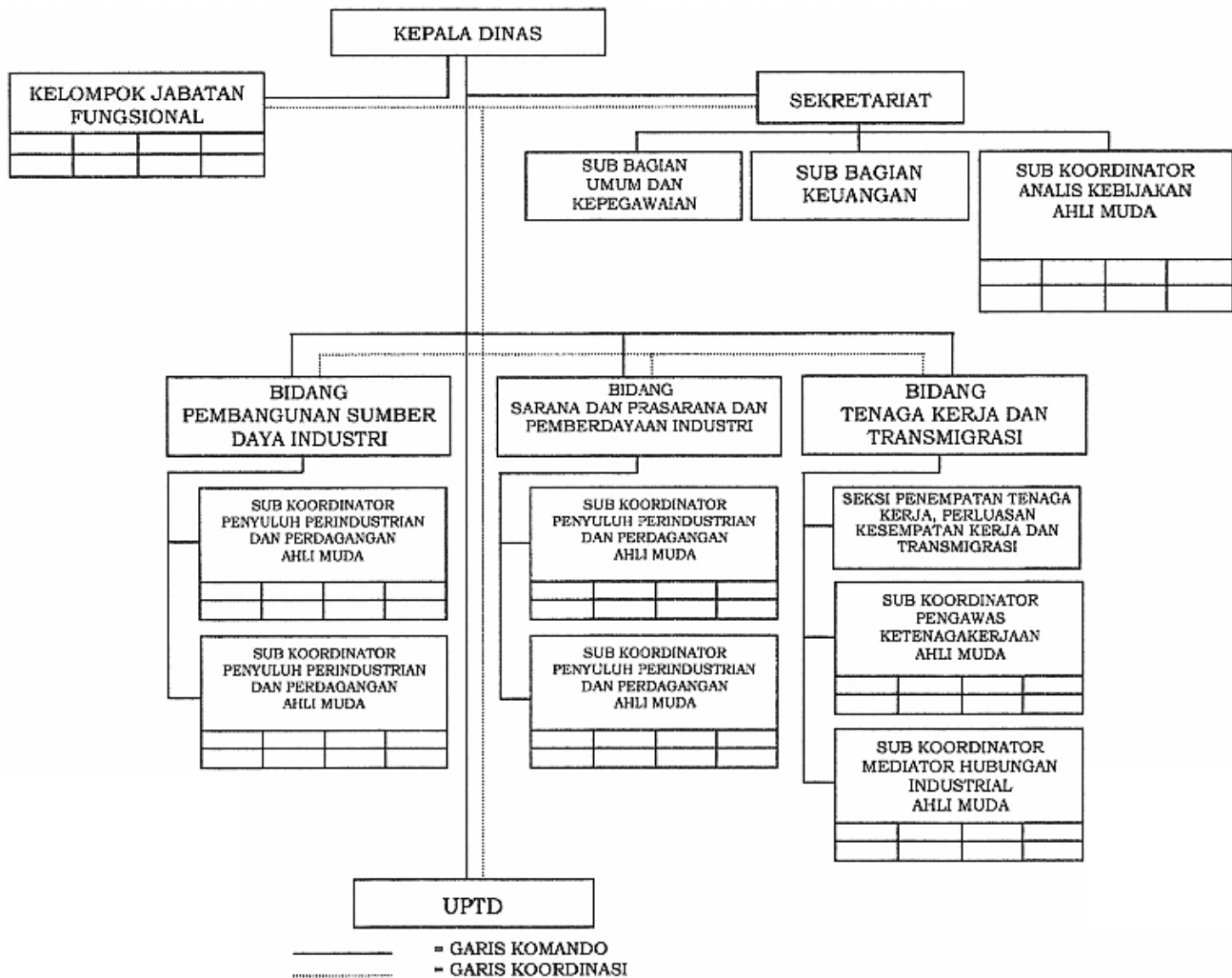
Sedangkan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro adalah pelaksana urusan Pemerintahan Daerah bidang Perindustrian, Tenaga kerja dan Transmigrasi yang mempunyai *tugas* membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, Tenaga kerja dan Transmigrasi dan tugas pembantuan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas , Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai *fungsi* :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro



Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda.
- c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri membawahi :
 - 1. Sub Koordinator Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda; dan
 - 2. Sub Koordinator Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda.
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri membawahi :
 - 1. Sub Koordinator Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda; dan
 - 2. Sub Koordinator Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda.
- e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
 - 2. Sub Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda; dan
 - 3. Sub Koordinator Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmer 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kabupaten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI) tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Perindustrian Tahun 2015 - 2019;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2015-2019.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- Pedoman resmi dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2024.
- Langkah pencapaian perencanaan program kegiatan Tiga tahunan dalam Renstra –PD Tahun 2024-2026.
- Renja-PD merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
- Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk : Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan .

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung

BAB IV : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana amanat PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, proses evaluasi harus dilakukan pada renja tahun 2022 dan Renja 2023 sampai bulan Pebruari yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu: kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil dari rencana program dan kegiatan.

Adapun tujuan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan unsur dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya dan
- d. Kebijakan sekaligus unit pelaksana untuk melaksanakannya

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan sekaligus pencapaian Renja dan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dapat dicermati bahwa tidak seluruh program yang telah direncanakan dalam Renstra dapat terealisasi. Keterbatasan anggaran daerah mengakibatkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan seluruh program kerja yang telah direncanakan pada renstra.

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Evaluasi dan Analisis Kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja berikutnya.

Berdasarkan evaluasi kinerja, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik (dari seluruh kegiatan rata-rata) mencapai **97,95%** dan realisasi keuangan mencapai 76,43% disamping adanya keterkaitan antara pencapaian kinerja dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi kedinasan.

Proses perencanaan strategi telah melibatkan seluruh komponen pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro serta instansi terkait dengan pelaksanaan program yang melalui pendekatan mekanisme informasi dan komunikasi formal. Demikian pula terhadap pelaku IKM yang menjadi sasaran dari sebagian besar program dan kegiatan, sehingga hal ini diharapkan dapat memotivasi mereka dalam mengembangkan usaha.

REKAPITULASI ALOKASI DANA DAN REALISASI BELANJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. BOJONEGORO TAHUN 2022

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp.)	Capaian Keuangan (%)	Realisasi Kegiatan
1	2	3	4	5	6
A.	URUSAN BIDANG TENAGA KERJA				
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.646.514.550	3.033.440.079	83,18	100%
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3.635.255.950	3.023.891.479	83,18	100%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	3.635.255.950	3.023.891.479	83,18	100%
	Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5.800.000	4.661.000	80,36	100%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5.800.000	4.661.000	80,36	84%
	Kegiatan : Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	1.503.200	1.503.200	100,00	100%
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	1.503.200	1.503.200	100,00	100%
	Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	3.955.400	3.384.400	85,56	100%
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	3.955.400	3.384.400	85,56	140%

Bab II Perubahan Renja 2024 - Evaluasi Pelaksanaan Renja PD TH. Lalu

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp.)	Capaian Keuangan (%)	Realisasi Kegiatan
1	2	3	4	5	6
A.	URUSAN BIDANG TENAGA KERJA				
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	794.303.100	641.320.050	80,73	100%
	Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	779.303.100	630.974.050	80,97	100%
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	18.300.000	14.082.000	76,95	100%
	Pelayanan antar Kerja	110.105.150	72.803.250	66,12	100%
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	21.900.000	17.288.000	78,94	115%
	Perluasan Kesempatan Kerja	628.997.950	526.800.800	83,75	100%
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	15.000.000	10.346.000	68,97	100%
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	15.000.000	10.346.000	68,97	100%
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	227.200.000	149.874.044	65,96	100%
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	204.400.000	128.119.544	62,68	100%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	18.800.000	16.071.000	85,48	100%
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	15.000.000	12.455.000	83,03	33%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	170.600.000	99.593.544	58,38	100%
	Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	22.800.000	21.754.500	95,41	20%
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.800.000	17.615.000	98,96	100%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	1.182.000	59,10	50%

Bab II Perubahan Renja 2024 - Evaluasi Pelaksanaan Renja PD TH. Lalu

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp.)	Capaian Keuangan (%)	Realisasi Kegiatan
1	2	3	4	5	6
A.	URUSAN BIDANG TENAGA KERJA				
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	2.000.000	1.957.500	97,88	100%
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.000.000	1.000.000	100,00	100%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.793.443.703	5.525.294.740	95,37	100%
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.828.000	76.052.650	99,09	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.982.000	99,10	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	2.827.250	94,24	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	449.000	89,80	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000	489.000	97,80	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.328.000	24.314.600	85,83	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.500.000	44.990.800	98,88	100%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.565.361.010	3.368.160.537	94,47	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.271.833.010	3.148.182.020	96,22	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	275.690.000	203.314.517	73,75	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.338.000	6.267.500	98,89	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000	985.000	98,50	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.229.000	84,58	100%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.000.000	3,745.000	93,63	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000	939,500	93,95	100%

Bab II Perubahan Renja 2024 - Evaluasi Pelaksanaan Renja PD TH. Lalu

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp.)	Capaian Keuangan (%)	Realisasi Kegiatan
1	2	3	4	5	6
A.	URUSAN BIDANG TENAGA KERJA				
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000	498.000	99,60	100%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.389.479	354.068.971	97,70	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.285.100	25.158.000	99,50	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.416.779	40.394.400	99,94	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000	11.000.000	100,00	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.877.600	19.861.500	99,92	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100,00	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	7.908.000	98,85	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.810.000	241.747.071	96,77	100%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.284.690	195.004.200	97,85	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.284.690	195.004.200	97,85	100%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.019.927	1.189.961.722	99,33	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.302.167	153.266.007	95,02	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.036.717.760	1.036.695.715	100,00	100%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.560.597	342.046.660	88,26	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.500.000	166.059.700	99,14	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.700.000	11.708.750	92,19	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.990.000	22.932.500	99,75	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.229.797	135.869.710	77,10	100%

Bab II Perubahan Renja 2024 - Evaluasi Pelaksanaan Renja PD TH. Lalu

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp.)	Capaian Keuangan (%)	Realisasi Kegiatan
1	2	3	4	5	6
A.	URUSAN BIDANG TENAGA KERJA				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.140.800	5.476.000	67,27	100%
B	URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.893.794.000	928.818.340	32,09	100%
	Kegiatan : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	2.893.794.000	928.818.340	32,10	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	297.452.000	266.197.340	89,49	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	285.000.000	187.175.500	65,68	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.311.342.000	475.445.500	20,57	100%
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	65.794.000	45.815.500	69,63	100%
	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	65.794.000	45.815.500	69,63	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	65.794.000	45.815.500	69,63	100%
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	302.789.300	165.113.000	54,53	100%
	Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	302.789.300	165.113.000	54,53	80%
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	302.789.300	165.113.000	54,53	100%
	TOTAL	13.723.838.653	10.489.675.753	76,43	97,95%

Apabila dibandingkan dengan evaluasi kinerja pada tahun 2022 maka capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2022 capaian sampai dengan Tri Bulan I belum belum berjalan. Jika diukur dengan jumlah IKM, dari 11.437 IKM tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 11.780 IKM pada tahun 2022 (2,99%). Kenaikan sebesar 343 IKM (2,99%) dalam satu tahun sudah cukup besar, karena IKM baru mulai bangkit setelah wabah Covid.

Sedangkan Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2022) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023) sebagaimana pada Tabel II-1. Hasil akhir kinerja tahun 2022 sudah mencapai target yang diharapkan dalam target pencapaian kinerja. Hanya beberapa kegiatan yang kinerjanya tidak mencapai 100%.

Hasil capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 dengan dukungan tabel sebagai berikut :

**Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja
di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2022**

o.	Uraian	Satuan	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	Orang	1.301.635	1.342.164
2	Penduduk Usia Kerja	Orang	1.012.630	1.047.121
3	Penduduk Bukan Usia Kerja	Orang	289.005	295.043
4	Bekerja (Pekerja)	Orang	692.456	729.533
5	Angkatan Kerja	Orang	727.513	755.603
6	Angkatan Kerja tertampung /Bukan Angkatan Kerja	Orang	285.117	291.518
7	Penganggur	Orang	35.057	35.440
8	TPAK	%	71,84	72,16
9	TPT	%	4,82	4,69
10	Tingkat Kesempatan Kerja	%	95,18	96,55

Sumber Data : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus /BPS-Statistics Indonesia

**Perkembangan Jumlah Penduduk
Berdasarkan Latar Belakang Mata Pencarian
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2022**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022
1	Pertanian	Orang	310.388	311.022
2	Buruh	Orang	114.723	115.342
3	Perdagangan	Orang	117.711	119.879
4	Industri	Orang	55.738	61.687
5	Jasa	Orang	159.647	162.072
6	Peg. Neg./ABRI.Pensiunan	Orang	222.140	222.728
7	Tenaga Kerja Musiman	Orang		

**Perkembangan Pengerahaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2022**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022
1	Pria	Orang	55	538
2	Wanita	Orang	75	265
	Jumlah	Orang	130	803

**Pencapaian Prestasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2022**

NO	NAMA	KATEGORI	TINGKAT
1	RSAB AISYIAH BOJONEGORO	Juara 1 Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Kategori Badan Usaha Skala Menengah oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan RI Tanggal 27 Oktober 2022.	Nasional
2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOJONEGORO	Piagam Penghargaan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro sebagai pembina LKS Bipartit perusahaan peserta "Penganugerahan Penghargaan Lembaga Kerjasama BIPARTIT Tahun 2022" oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.	Provinsi
3	KOPERASI KAREB UNIT SKT MPS KAPAS	Piagam Penghargaan kepada Koperasi KAREB Unit SKT MPS Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagai apresiasi telah mengikuti "Penganugerahan Penghargaan Lembaga Kerjasama BIPARTIT Tahun 2022" oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.	Provinsi

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan sumberdaya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan baik pada bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja, terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan fungsi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang berorientasi pada Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- c. Belum dipahaminya secara utuh tentang output, outcome sampai dengan benefit yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program kegiatan menjadi outcome kegiatan yang menunjang terhadap efektivitas program dan kegiatan;
- d. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam renstra, RKPD maupun RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
- e. Adanya bencana dunia dengan tersebarnya virus covid 19 khususnya di Indonesia sangat mempengaruhi capaian kinerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bojonegoro karena pelaksanaan kegiatan tidak bisa optimal.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2023, sebagai berikut :

Strategi untuk mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Peningkatan kemampuan dalam memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi aparatur penyelenggara sehingga dapat menyelenggarakan urusan yang dibebankan dengan optimal dan tepat sasaran;
- b. Pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan pegawai;
- c. Strategi untuk memberdayakan seluruh potensi yang ada pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro dalam rangka perwujudan good governance.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan realisasi capaian program/kegiatan, maka capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro pada akhir Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut:

Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 diatas yang merupakan evaluasi hasil Renja sampai degan akhir Triwulan IV Tahun 2022, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 97,95%
2. Predikat kinerja “Sangat Tinggi”

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator tujuan, sasaran, program/kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi hasil capaian Tujuan/Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2022), adalah:

1. Tujuan : Meningkatkan kesempatan kerja
Indikator tujuan: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja 98% dari target yang ditetapkan sebesar 72.1 %, terealisasi sebesar 71,01 %

2. Sasaran :

- 1) Meningkatnya jumlah penduduk bekerja
Indikator sasaran: Prosentase jumlah penduduk bekerja

Evaluasi hasil:

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 97,42% target yang ditetapkan sebesar 97,83% terealisasi sebesar 95,31%.

- 2) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri
Indikator kinerja : Prosentase pertumbuhan sektor industri
Evaluasi kinerja :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 77% dari target yang ditetapkan sebesar 3,9%, terealisasi sebesar 2,99%.

3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pelayanan public

Indikator sasaran : 1. Nilai SAKIP

2. Nilai SKM

Evaluasi Hasil :

(1) Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 94 % dari target yang ditetapkan sebesar 75,25.%, terealisasi sebesar 70,46%.

(2) Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% target yang ditetapkan sebesar 90,27%, terealisasi sebesar 91,43%.

b. Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2022 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2022), adalah sebagai berikut:

1. Program : Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator program:

Persentase tenaga kerja yang terdidik /terlatih

Evaluasi hasil:

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 78%, terealisasi sebesar 78 %

Pada Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu:

a) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, predikat kinerja “Sangat Tinggi”

b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, predikat kinerja “Sangat Tinggi”

c) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, predikat kinerja “Sangat Tinggi”

d) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, predikat kinerja “Sangat Tinggi”

2. Program : Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator program:

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

Evaluasi hasil:

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 87%, terealisasi sebesar 87%

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
- b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, predikat kinerja “Sangat Tinggi”

3. Program : Program Hubungan industrial

Indikator program:

Persentase Fasilitasi sarana hubungan industrial dan kelengkapan persyaratan kerja

Evaluasi hasil:

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
- b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”

4. Program : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator program:

Indikator-1 : Persentase pertumbuhan wirausaha baru

Indikator-2 : Persentase IKM yang sesuai standart mutu

Evaluasi hasil:

Indikator-1 : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2,19%, terealisasi sebesar 2,19%

Indikator-2 : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 48%, terealisasi sebesar 48%

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:

- a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”

5. Program : Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Indikator program:

Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan

Evaluasi hasil:

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:

- a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Sangat Tinggi”

6. Program : Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator program:

Persentase data industri yang masuk SIINas.

Evaluasi hasil:

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 17%, terealisasi sebesar 17%.

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:

- a) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, predikat kinerja “Tinggi”

7. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program:

Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah

Evaluasi hasil:

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar

100%, terealisasi sebesar 100%

Pada Program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu:

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, predikat kinerja “Sangat Tinggi”

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bojonegoro

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase jumlah penduduk bekerja/ Tingkat Kesempatan Kerja	-	-	97,58	97,83	98,06	95,07	96,55	98,06	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
2	Persentase pertumbuhan sektor industri	-	-	3,10	3,9	4,2	1,21	2,99	4,2	$\frac{\sum \text{IKM th. n} - \sum \text{IKM th. (n-1)}}{\sum \text{IKM th. (n-1)}} \times 100\%$
3	Nilai SAKIP PD	-	-	67,13	68,37	69,61	67,13	70,46	75,50 (BB)	Nilai SAKIP PD
4	Nilai IKM	-	-	82,01	82,21	82,41	90,22	91,43	91,65 (A)	Nilai IKM

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

A. Bidang Industri

1. Pengembangan dan pengoptimalan 13 kawasan industri dan pariwisata
2. Meningkatkan nilai tambah pada semua mata rantai produksi bidang industri, pertanian dan jasa dan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing.
3. Kurangnya kualitas SDM dalam pengolahan produk, peningkatan kualitas/mutu, diversifikasi produk dan packaging;
4. Masih banyak potensi alam hasil-hasil pangan yang belum diolah secara maksimal;
5. Belum optimalnya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau, standart mutu produk sesuai dengan keinginan konsumen;
6. Lemahnya pengetahuan teknologi informasi pemasaran serta lemahnya akses pemasaran terhadap hasil-hasil produksi;
7. Perlu terus ditingkatkan usaha-usaha untuk meningkatkan investasi di Bojonegoro baik dari sisi nilai investasi maupun jumlah investor.

B. Bidang Tanaga Kerja

1. Seiring dengan selesainya pembangunan infrastruktur eksplorasi migas di Bojonegoro maka ada lebih dari 8000 orang tenaga kerja akan tidak memiliki pekerjaan atau akan berkontribusi peningkatan pengangguran terbuka.
2. Masih banyak calon pekerja dan pekerja yang berasal dari Bojonegoro belum tersertifikasi, sehingga mempersulit untuk mendapatkan pekerjaan (kesempatan kerja). Apalagi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai awal tahun 2016 akan membuat para pekerja akan kesulitan dalam persaingan.
3. Banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kompetensi dengan lapangan kerja yang ada.
4. Banyaknya perusahaan yang tidak memenuhi aturan yang ada.

Tabel 2..1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022
Kabupaten Bojonegoro

NO.REK	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	19.223.395.352	-	5.793.443.703,00	5.525.294.740,00	95,37	5.452.731.323,00	5.525.294.740,00	29%
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	172.105.400	-	80.828.000,00	76.052.650,00	94,09	14.684.100	76.052.650,00	44%
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yg disusun dalam satu tahun	9.797.400	-	2.000.000,00	1.982.000,00	99,10	1.259.700	1.982.000,00	20%
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yg disusun dalam satu tahun	35.634.900	-	3.000.000,00	2.827.250,00	94,24	2.924.400	2.827.250,00	8%
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yg disusun dalam satu tahun	24.066.000	-	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.050.000	1.000.000,00	4%
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yg disusun dalam satu tahun	3.808.300	-	500.000,00	449.000,00	89,80	525.000	449.000,00	12%
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yg disusun dalam satu tahun	3.096.200	-	500.000,00	489.000,00	97,80	525.000	489.000,00	16%
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	16.032.600	-	28.328.000,00	24.314.600,00	85,83	7.875.000	24.314.600,00	152%
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dalam satu tahun	79.670.000	-	45.500.000,00	44.990.800,00	98,88	525.000,00	44.990.800,00	56%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	13.503.511.753	-	3.565.361.010,00	3.368.160.537,00	94,47	3.852.658.308,00	3.368.160.537,00	25%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan dalam satu tahun	12.245.830.553	-	3.271.833.010,00	3.148.182.020,00	96,22	3.459.308.308,00	3.148.182.020,00	26%
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan dalam satu tahun	1.169.380.000	-	275.690.000,00	203.314.517,00	73,75	378.000.000,00	203.314.517,00	17%
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan dalam satu tahun	22.516.450	-	6.338.000,00	6.267.500,00	98,89	3.675.000,00	6.267.500,00	28%
2.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yg dilaksanakan dalam satu tahun	20.633.000	-	1.000.000,00	985.000,00	98,50	650.000,00	985.000,00	5%
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yg dilaksanakan dalam satu tahun	17.241.400	-	5.000.000,00	4.229.000,00	84,58	5.250.000,00	4.229.000,00	25%
2.07.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yg dilaksanakan dalam satu tahun	14.700.000	-	4.000.000,00	3.745.000,00	93,63	4.200.000,00	3.745.000,00	25%
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yg dilaksanakan dalam satu tahun	6.685.350	-	1.000.000,00	939.500,00	93,95	1.050.000,00	939.500,00	14%
2.07.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD yg dilaksanakan dalam satu tahun	6.525.000	-	500.000,00	498.000,00	99,60	525.000,00	498.000,00	8%
3.07.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi Kepegawaian yang disediakan sesuai kebutuhan	499.944.000	-	-	-	-	-	-	0%
3.07.01.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	499.944.000	-	-	-	-	-	-	0%
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang disediakan sesuai kebutuhan	617.635.266	-	362.389.479,00	354.068.971,00	97,70	148.382.160,00	354.068.971,00	57%
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan dalam satu tahun	17.300.000	-	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.250.000,00	5.000.000,00	29%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan dalam satu tahun	56.277.700	-	25.285.100,00	25.158.000,00	99,50	18.972.500,00	25.158.000,00	45%
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang dilaksanakan dalam satu tahun	137.343.286	-	40.416.779,00	40.394.400,00	99,94	18.833.620,00	40.394.400,00	29%
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan dalam satu tahun	62.961.000	-	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	14.485.960,00	11.000.000,00	17%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam satu tahun	61.428.280	-	19.877.600,00	19.861.500,00	99,92	14.908.080,00	19.861.500,00	32%
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam satu tahun	12.870.000	-	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	23%
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yg disiapkan dalam satu tahun	48.000.000	-	8.000.000,00	7.908.000,00	98,85	6.300.000,00	7.908.000,00	16%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan dalam satu tahun	221.455.000	-	249.810.000,00	241.747.071,00	96,77	66.632.000,00	241.747.071,00	109%
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	254.029.700	-	199.284.690,00	195.004.200,00	97,85	-	195.004.200,00	77%
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam satu tahun	254.029.700	-	199.284.690,00	195.004.200,00	97,85	-	195.004.200,00	77%
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kantor yang dilaksanakan	3.317.172.370	-	1.198.019.927,00	1.189.961.722,00	99,33	1.250.122.640,00	1.189.961.722,00	36%
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dilayani per tahun	4.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa yang terbayar dalam satu tahun	461.205.642	-	161.302.167,00	153.266.007,00	95,02	152.352.400,00	153.266.007,00	33%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilayani per tahun	2.851.966.728	-	1.036.717.760,00	1.036.695.715,00	100,00	1.097.770.240,00	1.036.695.715,00	36%
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa pemeliharaan yang dilaksanakan dalam satu tahun	858.996.863	-	387.560.597,00	342.046.660,00	88,26	186.884.115,00	342.046.660,00	40%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilayani per tahun	443.125.000	-	167.500.000,00	166.059.700,00	99,14	146.146.359,00	166.059.700,00	37%
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilayani per tahun	60.884.000	-	12.700.000,00	11.708.750,00	92,19	12.550.000,00	11.708.750,00	19%
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin yang dilakukan per tahun	80.752.089	-	22.990.000,00	22.932.500,00	99,75	20.110.000,00	22.932.500,00	28%
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilakukan per tahun	235.896.084	-	176.229.797,00	135.869.710,00	77,10	2.148.456,00	135.869.710,00	58%
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilakukan per tahun	38.339.690	-	8.140.800,00	5.476.000,00	67,27	5.929.300,00	5.476.000,00	14%
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja	1.552.407.150	-	1.299.143.600,00	3.033.440.079,00	233,50	1.299.143.600,00	3.033.440.079,00	195%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	1.473.117.750	-	1.283.375.000,00	3.023.891.479,00	235,62	1.283.375.000,00	3.023.891.479,00	205%
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	1.473.117.750	-	1.283.375.000,00	3.023.891.479,00	235,62	1.283.375.000,00	3.023.891.479,00	205%
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	50.616.200	-	9.877.000,00	4.661.000,00	47,19	9.877.000,00	4.661.000,00	9%
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah instruktur yang memiliki standar mutu	50.616.200	-	9.877.000,00	4.661.000,00	47,19	9.877.000,00	4.661.000,00	9%
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Meningkatnya jumlah LPK yang memiliki perizinan	13.162.100	-	3.071.600,00	1.503.200,00	48,94	3.071.600,00	1.503.200,00	11%
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Rekomendasi dan Perpanjangan ijin LPK	13.162.100	-	3.071.600,00	1.503.200,00	48,94	3.071.600,00	1.503.200,00	11%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Meningkatnya produktifitas perusahaan kecil	15.511.100	-	2.820.000,00	3.384.400,00	120,01	2.820.000,00	3.384.400,00	22%
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang bisa meningkatkan produktivitas usahanya	15.511.100	-	2.820.000,00	3.384.400,00	120,01	2.820.000,00	3.384.400,00	22%
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	319.080.085	-	794.303.100,00	641.320.050,00	80,74	90.622.750,00	641.320.050,00	201%
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pelayanan pencari kerja di Kab Bojonegoro	207.771.537	-	779.303.100,00	630.974.050,00	80,97	56.458.000,00	630.974.050,00	304%
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya Petugas Pelayanan Antar Kerja Di Bursa Kerja Khusus (BKK)	67.715.500	-	18.300.000,00	14.082.000,00	76,95	24.091.650,00	14.082.000,00	21%
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Terlayannya Pencari Kartu AK-1 di Kabupaten Bojonegoro	34.060.600	-	110.105.150,00	72.803.250,00	66,12	22.852.300,00	72.803.250,00	214%
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terlaksananya Koordiansi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Khusus / Disabilitas dan Lansia	49.805.950	-	21.900.000,00	17.288.000,00	78,94	2.741.900,00	17.288.000,00	35%
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Terlaksananya Kegiatan Dalam Rangka Penempatan Tenaga Kerja	56.189.487	-	628.997.950,00	526.800.800,00	83,75	6.772.150,00	526.800.800,00	938%
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh informasi pasar kerja (IPK) dan penyelenggaraan pasar kerja melalui bursa kerja/job fair	111.308.548	-	15.000.000,00	10.346.000,00	68,97	34.164.750,00	10.346.000,00	9%
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersebar nya Informasi Lowongan Kerja di Kabupaten Bojonegoro	75.232.900	-	15.000.000,00	10.346.000,00	68,97	8.639.200,00	10.346.000,00	14%
2.07.04.2.03.02	Job Fair/Bursa Kerja	Terintegrasinya Pemberi Kerja dan Pencari Kerja	36.075.648	-	-	-	-	25.525.550,00	-	0%
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terbentuknya sarana hubungan industrial dan kelengkapan persyaratan kerja	506.987.500	-	227.200.000,00	149.874.044,00	65,97	112.200.000,00	149.874.044,00	30%
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Bimtek, Usulan UMK, Pemasyarakatan HI & Pelayanan Syarat Kerja	383.162.900	-	204.400.000,00	128.119.544,00	62,68	91.200.000,00	128.119.544,00	33%
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan	54.207.200	-	18.800.000,00	16.071.000,00	85,48	15.750.000,00	16.071.000,00	30%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Bimtek Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama	50.367.200	-	15.000.000,00	12.455.000,00	83,03	15.750.000,00	12.455.000,00	25%
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Perumusan dan pengusulan UMK, Pemantau THR, Pemantauan Pengupahan, Sosialisasi UMK, dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	278.588.500	-	170.600.000,00	99.593.544,00	58,38	59.700.000,00	99.593.544,00	36%
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya mediasi perselisihan hubungan industrial, pembinaan hubungan industrial dan verifikasi serikat pekerja/serikat buruh	123.824.600	-	22.800.000,00	21.754.500,00	95,41	21.000.000,00	21.754.500,00	18%
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Sarasehan May Day dan pembinaan HI	96.152.250	-	17.800.000,00	17.615.000,00	98,96	15.750.000,00	17.615.000,00	18%
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	8.680.450	-	2.000.000,00	1.182.000,00	59,10	2.100.000,00	1.182.000,00	14%
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Verifikasi dan Rekapitulasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam perusahaan	10.498.900	-	2.000.000,00	1.957.500,00	97,88	2.100.000,00	1.957.500,00	19%
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pemantauan Kepesertaan BPJS kepada Perusahaan	8.493.000	-	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.050.000,00	1.000.000,00	12%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi SDM bagi sentra IKM melalui Bimbingan Teknis	1.571.862.100	-	2.893.794.000,00	928.818.340,00	32,10	193.694.080,00	928.818.340,00	59%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
3.31.02.2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan industri kanupaten	1.571.862.100	-	2.893.794.000,00	928.818.340,00	32,10	193.694.080,00	928.818.340,00	59%
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Telaksananya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Industri	774.579.850	-	297.452.000,00	266.197.340,00	89,49	146.472.280,00	266.197.340,00	34%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Pendataan Sentra IKM	23.980.000	-	285.000.000,00	187.175.500,00	65,68	3.530.000,00	187.175.500,00	781%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	773.302.250	-	2.311.342.000,00	475.445.500,00	20,57	43.691.800,00	475.445.500,00	61%
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Program Pengendalian Izin Usaha Industri	142.717.000	-	65.794.000,00	45.815.500,00	69,63	31.500.000,00	45.815.500,00	32%
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Dan Singkronisasi Kegiatan pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup, IUI, IPUI, IUKI, dan UPKI	142.717.000	-	65.794.000,00	45.815.500,00	69,63	31.500.000,00	45.815.500,00	32%
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Dan Pemeriksaan Dokumen dan / atau Observasi lapangan untuk memastikan pemenuan komitmen Perusahaan terhadap penerbitan izin usaha Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan UPKI	142.717.000	-	65.794.000,00	45.815.500,00	69,63	31.500.000,00	45.815.500,00	32%
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase usaha industri melalui SIINAS dan mampu bersaing dipasar lokal dan global	377.830.000	-	302.789.300,00	165.113.000,00	54,53	52.106.250,00	165.113.000,00	44%
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya SIINAS dan Rekomendasi, Bimtek Standarisasi dan Fasilitasi HKI	377.830.000	-	302.789.300,00	165.113.000,00	54,53	52.106.250,00	165.113.000,00	44%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Terlaksananya Fasilitas HKI, Workshop Standarisasi Produk makanan minuman, Workshop Industri hijau, dan Diseminasi Perijinan sektor industri melalui OSS dan SIINAS	377.830.000	-	302.789.300,00	165.113.000,00	54,53	52.106.250,00	165.113.000,00	44%
	TOTAL		23.694.279.186,75	-	11.376.467.703,00	10.489.675.753,00	92,21	7.231.998.003,00	10.489.675.753,00	44%

Tabel 2.2.1
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

No. Rek	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
2.07.03	Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatkan kesempatan kerja	PROGRAM : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang terdidik / terlatih	78%	78%	100%			
2.07.03.2.01				Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan yang nilainya memenuhi standar kompetensi	315 org	315 Orang	100%			
2.07.03.2.01.01				Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	496 Org	496 Orang	100%			
2.07.03.2.02				Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang dibina	98,72%	98,72%	100%			
2.07.03.2.02.01				Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	38 LPKS	32 LPKS	84%	Sesuai LPKS yang mendaftar	Tahun 2023, kegiatan pembinaan akan ditingkatkan	—
2.07.03.2.03				Kegiatan : Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan	25 LPKS	25 LPKS	100%			
2.07.03.2.03.01				Sub Kegiatan : Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	10 rekom	10 rekom	100%			
2.07.03.2.04				Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah pelaksanaan rakor dan konsultasi yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	100%			
2.07.03.2.04.01				Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 perusahaan	7 Perusahaan	140%			
2.07.04				PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	87%	87%	100%			
2.07.04.2.01				Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja di Kab Bojonegoro	2063 Orang	2063 Orang	100%			
2.07.04.2.01.01				Sub Kegiatan : Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain lain untuk peningkatan kompetensi	40 Orang	40 Orang	100%			
2.07.04.2.01.02				Sub Kegiatan : Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2871 orang	2871 orang	100%			
2.07.04.2.01.04				Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 perusahaan	23 perusahaan	115%			
2.07.04.2.01.05				Sub Kegiatan : Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1 KK	1 KK	100%			
2.07.04.2.03				Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh informasi pasar kerja (IPK)	8200 orang	8200 orang	100%			

No. Rek	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
2.07.04.2.03.01				Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	8500 lowongan kerja	8500 lowongan kerja	100%			
2.07.05				PROGRAM : HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Fasilitasi sarana hubungan industrial dan kelengkapan persyaratan kerja	100 %	100 %	100%			
2.07.05.2.01				Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang disahkan	20 perusahaan	20 perusahaan	100%			
2.07.05.2.01.01				Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 perusahaan	20 perusahaan	100%			
2.07.05.2.01.02				Sub Kegiatan : Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	3 perusahaan	1 perusahaan	33%	Berdasarkan pengajuan perusahaan	Meningkatkan sosialisasi penyusunan PKB	—
2.07.05.2.01.03				Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 laporan	5 laporan	100%			
2.07.05.2.02				Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan	20 kasus	4 kasus	20%	Sesuai perselisihan yang ada	Fasilitasi terus ditingkatkan	—
2.07.05.2.02.01				Sub Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 perkara	50 perkara	100%			
2.07.05.2.02.02				Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20 perusahaan	10 perusahaan	50%	Sesuai perkara perselisihan yang ada	Meningkatkan Sosialisasi untuk mengurangi perselisihan	
2.07.05.2.02.03				Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 perusahaan	10 perusahaan	100%			
2.07.05.2.02.05				Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10 perusahaan	10 perusahaan	100%			

No. Rek	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
2.07.01				PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100%			
2.07.01.2.01				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	11 dokumen	11 dokumen	100%			
2.07.01.2.01.01				Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%			
2.07.01.2.01.02				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 dokumen	1 dokumen	100%			
2.07.01.2.01.03				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%			
2.07.01.2.01.04				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.07.01.2.01.05				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.07.01.2.01.06				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan	100%			
2.07.01.2.01.07				Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100%			
2.07.01.2.02				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 laporan	5 laporan	100%			
2.07.01.2.02.01				Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 orang	276 orang	100%			
2.07.01.2.02.02				Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 dokumen	23 dokumen	100%			
2.07.01.2.02.03				Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 kali	24 kali	100%			
2.07.01.2.02.04				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	8 kali	8 kali	100%			

No. Rek	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
2.07.01.2.02.05				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%			
2.07.01.2.02.06				Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 laporan	1 laporan	100%			
2.07.01.2.02.07				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	100%			
2.07.01.2.02.08				Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 laporan	12 laporan	100%			
2.07.01.2.06				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	8 laporan	8 laporan	100%			
2.07.01.2.06.01				Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 buah	100 buah	100%			
2.07.01.2.06.02				Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 jenis	5 jenis	100%			
2.07.01.2.06.03				Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 jenis	25 jenis	100%			
2.07.01.2.06.04				Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 kotak	100 kotak	100%			
2.07.01.2.06.05				Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	100%			
2.07.01.2.06.06				Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 surat kabar	2 surat kabar	100%			
2.07.01.2.06.08				Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	100%			
2.07.01.2.06.09				Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 kali	48 kali	100%			
2.07.01.2.07				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	100%			
2.07.01.2.07.06				Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%			

No. Rek	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
2.07.01.2.08				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100%			
2.07.01.2.08.02				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	100%			
2.07.01.2.08.04				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%			
2.07.01.2.09				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	5 jenis	5 jenis	100%			
2.07.01.2.09.01				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiaknya	2 kendaraan	2 kendaraan	100%			
2.07.01.2.09.02				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 kendaraan	24 kendaraan	100%			
2.07.01.2.09.06				Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 jenis	3 jenis	100%			
2.07.01.2.09.09				Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 buah	2 buah	100%			
2.07.01.2.09.10				Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 buah	2 buah	100%			

Tabel 2.2.2
Capaian Pelaksanaan Urusan Pilihan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

No. Rek	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
3.31.02	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	PROGRAM : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	2,19%	2,19%	100%			
					Persentase IKM yang sesuai standar mutu	48%	48%	100%			
3.31.02.2				Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pembangunan industri	25 keg	25 keg	100%			
3.31.02.2.01.03				Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	9 Dok	9 Dok	100%			
3.31.02.2.01.04				Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 Dok	6 Dok	100%			
3.31.02.2.01.05				Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	9 Dok	9 Dok	100%			
3.31.03				PROGRAM : PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	100 %	100 %	100%			

3.31.03.2.01				Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang diterbitkan	8 izin	8 izin	100%			
3.31.03.2.01.01				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100%			
3.31.04				PROGRAM : PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data industri yang masuk SIINas	17 %	17 %	100%			
3.31.04.2.01				Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi industri yang tersedia	45 perusahaan	36 perusahaan	80%	Sesuai data yang terdaftar di SIINAS	Sosialisasi ke perusahaan yang terdaftar ke SIINAS	—
3.31.04.2.01.02				Sub Kegiatan : Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dok	100%			

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi, maka disusun strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan baik di bidang industri maupun di bidang tenaga kerja. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan terdahulu, maka untuk merealisasikannya diperlukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan (Musrenbang desa, Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang kabupaten), rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi

Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perencanaan, perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Rumusan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024
pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel. 3.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Satuan Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Selisih (Lebih/Kurang)		Catatan Penting
			Target Kinerja 2024			Pagu Anggaran (Rp)					Pagu Perubahan RKPD dikurangi RKPD Induk	Pagu Perubahan RKPD dikurangi APBD Induk	
			RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (9-7)	13 = (9-8)	14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	100%	5.824.362.690	6.906.108.399	8.415.709.918	Bojonegoro		2.591.347.228	1.509.601.519	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	65.418.305	65.418.305	134.198.505	Bojonegoro		68.780.200	68.780.200	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.322.685	1.322.685	1.322.685	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	970.620	970.620	970.620	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.102.500	1.102.500	1.102.500	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	551.250	551.250	551.250	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	551.250	551.250	551.250	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2 laporan	2 laporan	3 laporan	60.368.750	60.368.750	129.148.950	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	68.780.200	68.780.200	-Tambahan 50.000.000 untuk SKM -Pergeseran anggaran 18.780.200 dari sub kegiatan lainnya
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	551.250	551.250	551.250	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	4.045.291.223	5.070.417.153	5.749.103.760	Bojonegoro		1.703.812.537	678.686.607	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	23 orang	23 orang	23 orang	3.632.273.723	4.657.399.653	5.471.356.260	Bojonegoro	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1.839.082.537	813.956.607	Tambahan gaji 813.956.607

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Satuan Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Selisih (Lebih/Kurang)		Catatan Penting
			Target Kinerja 2024			Pagu Anggaran (Rp)					Pagu Perubahan RKPD dikurangi RKPD Induk	Pagu Perubahan RKPD dikurangi APBD Induk	
			RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (9-7)	13 = (9-8)	14
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	396.900.000	396.900.000	252.130.000	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-144.770.000	-144.770.000	Honor Pengelola Keuangan (KPA dan Pengelola yang tidak dapat diserap) Digeser
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	3.848.600	3.848.600	13.760.600	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	9.912.000	9.912.000	Pergeseran anggaran 9.912.000 dari sub kegiatan lainnya
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	682.500	682.500	682.500	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	5.512.500	5.512.500	5.512.500	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.410.000	4.410.000	4.410.000	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	1.102.500	1.102.500	1.102.500	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	561.400	561.400	149.400	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-412.000	-412.000	Pergeseran anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	219.773.980	219.773.980	379.858.005	Bojonegoro		160.084.025	160.084.025	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3 paket	3 paket	3 paket	5.503.500	5.503.500	9.003.500	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3.500.000	3.500.000	Pergeseran anggaran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3 paket	3 paket	3 paket	20.321.400	20.321.400	32.634.000	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.312.600	12.312.600	Pergeseran anggaran
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4 paket	4 paket	4 paket	19.772.600	19.772.600	21.872.600	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.100.000	2.100.000	Pergeseran anggaran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2 paket	2 paket	2 paket	16.528.700	16.528.700	26.228.325	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	9.699.625	9.699.625	Pergeseran anggaran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4 paket	4 paket	4 paket	16.137.000	15.887.000	19.887.000	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3.750.000	4.000.000	Pergeseran anggaran

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Satuan Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Selisih (Lebih/Kurang)		Catatan Penting	
			Target Kinerja 2024			Pagu Anggaran (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Pagu Perubahan RKPD dikurangi RKPD Induk		Pagu Perubahan RKPD dikurangi APBD Induk
			RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (9-7)	13 = (9-8)	14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	250.000	250.000	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	250.000	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	10 laporan	10 laporan	11 laporan	7.457.600	7.457.600	9.979.600	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	2.522.000	2.522.000	Pergeseran anggaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	134.053.180	134.053.180	260.002.980	Bojonegoro	Retribusi Daerah - LRA	125.949.800	125.949.800	- Tambahan anggaran sebesar 20.000.000 - Pergeseran anggaran dari Honor Pengelola Keuangan, Gaji Non ASN dan Tagihan Listrik, Internet sebesar 37.401.600 - pergeseran anggaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	1.319.939.553	1.335.064.553	1.373.602.341	Bojonegoro		53.662.788	38.537.788	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	193.369.313	193.369.313	184.851.885	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-8.517.428	-8.517.428	1. Belanja Listrik PDAM dan Internet sebesar 8.517.428 yang tidak dapat diserap akan digeser untuk Pemeliharaan Mesin dan Lainnya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12 laporan	35 laporan	35 laporan	1.126.570.240	1.141.695.240	1.188.750.456	Bojonegoro	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.180.216	47.055.216	Tambahan untuk Belanja : 1. Jasa Keamanan 2. Jasa Kebersihan 3. Jasa Pengemudi
**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	15 Unit	-	-	157.764.800	Bojonegoro		157.764.800	157.764.800	
**Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	15 Unit	-	-	157.764.800	Bojonegoro		157.764.800	157.764.800	- Tambahan Anggaran untuk Belanja Pengadaan Kendaraan Roda 2 Operasional Kantor 80.118.000 - Pergeseran anggaran untuk pengadaan Komputer 15.157.200 - Pergeseran anggaran untuk 2 printer 9.031.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	215.434.408	215.434.408	621.182.507	Bojonegoro		405.748.099	405.748.099	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Satuan Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Selisih (Lebih/Kurang)		Catatan Penting
			Target Kinerja 2024			Pagu Anggaran (Rp)			Pagu Perubahan RKPD dikurangi RKPD Induk			Pagu Perubahan RKPD dikurangi APBD Induk		
			RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (9-7)	13 = (9-8)	14	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	3 unit	3 unit	3 unit	173.939.629	173.939.629	253.991.828	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	80.052.199	80.052.199	Pergeseran anggaran Untuk Belanja: - Bahan Bakar Minyak 25.000.000 - Pemeliharaan kendaraan 25.000.000 - BBM 26.038.600	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	24 unit	24 Unit	24 Unit	12.300.000	12.300.000	15.300.000	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3.000.000	3.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3 jenis	3 unit	5 unit	20.720.000	20.720.000	57.225.900	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.505.900	36.505.900	Usulan Tambahan Sebesar 13.619.600 untuk Belanja: - Gergaji Selendang 6.119.600 - Pemeliharaan CCTV 6.000.000 - Pemeliharaan mesin Absensi 1.500.000 Pergeseran anggaran dar sub kegiatan lain untuk belanja: - Mata Gerinda 423.500 - Batu Asah Gaji Pisau Gergaji 912.800 - Service TV 600.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2 unit	2 unit	3 unit	2.255.879	2.255.879	276.255.879	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	274.000.000	274.000.000	Usulan Tambahan Anggaran sebesar 60.000.000 Untuk Belanja Konsultasi Perencanaan Rehab Gedung	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2 unit	2 unit	4 unit	6.218.900	6.218.900	18.408.900	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12.190.000	12.190.000	Pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	100%	100%	100%	160.000.000	160.000.000	143.219.800			-16.780.200	-16.780.200		
Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	160.000.000	160.000.000	143.219.800			-16.780.200	-16.780.200		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	160.000.000	160.000.000	143.219.800			-16.780.200	-16.780.200	Pergeseran perjalanan dinas ke sub keg koor dan penyusunan laporan capaian kinerja	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang terdidik / terlatih	%	80%	80%	80%	839.523.000	3.588.355.730	3.530.024.418	Bojonegoro		2.690.501.418	-58.331.312		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Satuan Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Selisih (Lebih/Kurang)		Catatan Penting
			Target Kinerja 2024			Pagu Anggaran (Rp)					Pagu Perubahan RKPD dikurangi RKPD Induk	Pagu Perubahan RKPD dikurangi APBD Induk	
			RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (9-7)	13 = (9-8)	14
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan yang nilainya memenuhi standar kompetensi	orang	120	460 orang	460 orang	823.453.900	3.572.286.630	3.406.292.818	Bojonegoro	DBH-CHT Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.582.838.918	-165.993.812	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	120	460 orang	460 orang	823.453.900	3.572.286.630	3.406.292.818	Bojonegoro	DBH-CHT Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.582.838.918	-165.993.812	- Pegeseran anggaran
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang dibina	%	20 %	20 %	20 %	9.856.600	9.856.600	117.519.100	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.662.500	107.662.500	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	9.856.600	9.856.600	117.519.100	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.662.500	107.662.500	Tambahan Anggaran sebesar 63.000.000 digunakan untuk hibah bantuan sarana atau peralatan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Pergeseran dari pelatihan Rp 38.390.300
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan	Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	2.041.500	2.041.500	2.041.500	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	perizinan	10 perizinan	10 perizinan	10 perizinan	2.041.500	2.041.500	2.041.500	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah pelaksanaan rakor dan konsultansi yang dilaksanakan	kali	5 kali	5 kali	5 kali	4.171.000	4.171.000	4.171.000	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	perusahaan	5 perusahaan	5 perusahaan	5 perusahaan	4.171.000	4.171.000	4.171.000	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%	75%	75%	75%	214.630.337	929.030.337	1.021.495.937	Bojonegoro		806.865.601	92.465.600	
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja di Kab Bojonegoro	orang	1800 orang	1800 orang	1800 orang	94.282.900	438.283.900	438.935.700	Bojonegoro		344.652.801	651.800	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	orang	20 orang	20 orang	20 orang	32.296.232	32.296.232	30.896.232	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-1.400.000	-1.400.000	Pergeseran anggaran

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Satuan Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Selisih (Lebih/Kurang)		Catatan Penting
			Target Kinerja 2024			Pagu Anggaran (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Pagu Perubahan RKPD dikurangi RKPD Induk	Pagu Perubahan RKPD dikurangi APBD Induk	
			RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (9-7)	13 = (9-8)	14
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	1800 orang	1800 orang	1800 orang	18.996.915	18.996.915	25.848.715	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	6.851.800	6.851.800	Pergeseran anggaran
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	orang	10 orang	10 orang	10 orang	6.878.995	24.823.995	20.023.995	Bojonegoro	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	13.145.000	-4.800.000	Pergeseran anggaran
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	2 orang	2 orang	2 orang	36.110.758	362.166.758	362.166.758	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	326.056.001	-	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh informasi pasar kerja (IPK)	orang	8200 orang	8200 orang	8200 orang	85.347.437	175.746.437	178.498.837	Bojonegoro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	93.151.400	2.752.400	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	9.071.160	9.071.160	13.273.560	Bojonegoro	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	4.202.400	4.202.400	Pergeseran anggaran
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	orang	50 orang	50 orang	50 orang	76.276.277	166.675.277	165.225.277	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	88.949.000	-1.450.000	Pergeseran anggaran
Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang Terdaftar	Orang	150	450	450 orang	35.000.000	315.000.000	404.061.400			369.061.400	89.061.400	
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	150	630	855 Orang	35.000.000	315.000.000	404.061.400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	369.061.400	89.061.400	Pergeseran anggaran
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Fasilitas sarana hubungan industrial dan kelengkapan persyaratan kerja	%	100%	100%	100%	223.310.000	6.462.879.920	16.384.338.737	Bojonegoro		16.161.028.737	9.921.458.817	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang disahkan	perusaha an	20 perusahaan	20 perusahaan	20 perusaha an	113.760.000	113.760.000	113.760.000	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	

[illegible]

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Satuan Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Selisih (Lebih/Kurang)		Catatan Penting	
			Target Kinerja 2024			Pagu Anggaran (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Pagu Perubahan RKPD dikurangi RKPD Induk		Pagu Perubahan RKPD dikurangi APBD Induk
			RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (9-7)	13 = (9-8)	14
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	2,31%	2,31%		667.690.784	1.413.408.734	1.968.338.834	Bojonegoro		1.306.079.050	554.930.100	
	Persentase IKM yang sesuai standar mutu	%	80 %	80 %									
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembangunan industri	kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan		667.690.784	1.413.408.734	1.968.338.834	Bojonegoro		1.306.079.050	554.930.100	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	dokumen	1,00	1,00	1,00	240.000.000	240.000.000	234.569.000	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-5.431.000	-5.431.000	Pergeseran anggaran
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	5 dokumen	5 dokumen	16 dokumen	343.107.894	677.015.844	856.945.944	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	513.838.050	179.930.100	Usulan tambahan anggaran untuk 3 Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas bagi Pelaku IKM sebesar Rp. 105.297.300 untuk 3 kali kegiatan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	38.706.500	200.516.500	205.947.500	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	167.241.000	5.431.000	Pergeseran anggaran
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	45.876.390	295.876.390	670.876.390	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	625.000.000	375.000.000	Tambahan hibah mesin digital printing Rp 375.000.000
											-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	%	100%	100%	100%	33.075.000	88.766.800	88.766.800	Bojonegoro		55.691.800	-	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Izin yang diterbitkan	izin	8 izin	8 izin	8 izin	33.075.000	88.766.800	88.766.800	Bojonegoro		55.691.800	-	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Satuan Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Selisih (Lebih/Kurang)		Catatan Penting	
			Target Kinerja 2024			Pagu Anggaran (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Pagu Perubahan RKPD dikurangi RKPD Induk		Pagu Perubahan RKPD dikurangi APBD Induk
			RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (9-7)	13 = (9-8)	14
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berkas Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	33.075.000	88.766.800	88.766.800	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.691.800	-	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data industri yang masuk SIINas	%	20 %	20 %	20 %	54.712.560	54.712.560	54.712.560	Bojonegoro		-	-	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi industri yang tersedia	perusaha n	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusaha n	54.712.560	54.712.560	54.712.560	Bojonegoro		-	-	
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	54.712.560	54.712.560	54.712.560	Bojonegoro	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	
						8.044.967.557	19.603.262.480	31.606.607.004			23.611.513.834	12.003.344.524	

Bojonegoro, 31 Juli 2024
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOJONEGORO


WELLY FITRAMA, S.STP.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770917 199511 1 001

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai Tribulan II yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seperti di bidang Reformasi Birokrasi, Audit, dll.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 12.003.344.524,- (38%) dari anggaran semula murni Rp. 19.603.262.480,- menjadi anggaran perubahan Rp. 31.606.607.004,- perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak terkait, terutama yang berkaitan dengan penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan adanya konsistensi peraturan sehingga semua program kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOJONEGORO**



WELLY FITRAMA, S.STP,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770917 199511 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Jl. Basuki Rahmat No.4 Telp. 0353-3412556
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
NOMOR : 188/ 10.02 /KEP/412.218/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA – PD)
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa guna mengantisipasi adanya perbedaan dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, maka sangat perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta terkait dengan adanya kompetensi dalam menyusun, mengevaluasi capaian program dan kegiatan tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 47 lembaran Negara nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389).

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

nomor 10 Tambahan Lembaran Negara nomor 4421).

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara nomor 4548).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
9. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
10. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) sebagaimana diktum PERTAMA adalah :

1. Mengkaji dan mengevaluasi Renja-PD tahun sebelumnya termasuk capaian dan kemajuannya;
2. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024;
3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024;
4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan demi kesempurnaan Renja;
6. Menyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

KETIGA : Tim Penyusun Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki isebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 22 Pebruari 2023

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOJONEGORO**


WELLY FITRAMA, S.STP,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770917 199511 1 001

Lampiran : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 188/ 10.02 /KEP/412.218/2023
Tanggal : 22 Pebruari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	2
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	KETUA
2	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	SEKRETARIS
3	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	ANGGOTA
4	Kepala Bidang Bidang Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Industri	ANGGOTA
5	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	ANGGOTA
6	Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perinaker Kabupaten Bojonegoro	ANGGOTA
7	Kasubag. Keuangan	ANGGOTA
8	Kasubag Umum Kepegawaian	ANGGOTA
9	Sub. Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Dinas Perinaker Kab. Bojonegoro	ANGGOTA
10	Sub. Koordinator Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perinaker Kabupaten Bojonegoro	ANGGOTA
11	Sub. Koordinator Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri Dinas Perinaker Kabupaten Bojonegoro	ANGGOTA
12	Kasi. Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja Dan Transmigrasi Dinas Perinaker Kabupaten Bojonegoro	ANGGOTA
13	Sub. Koordinator Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Perinaker Kabupaten Bojonegoro	ANGGOTA

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 22 Pebruari 2023

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOJONEGORO**


WELLY FITRAMA, S.STP,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770917 199511 1 001